

Analysis Of Daily Government Budget Performance In The Gerbangkertosusila Region Before (2017-2019) And During Pandemi Covid 19 (2020-2021)

Analisis Kinerja APBD Pemerintah Daerah Di Wilayah Gerbangkertosusila Sebelum (Tahun 2017-2019) Dan Semasa Pandemi Covid 19 (Tahun 2020-2021)

Beauty Pujiningrum Suwito^{1*}, Muhammad Taufiq Hidayat²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya^{1,2}

1221800097@surel.untag-sby.ac.id¹, taufiqhidayat@untag-sby.ac.id²

*Corresponding Author

ABSTRACT

2020 was a bad history for the Indonesian economy. The Covid 19 pandemic has had an impact on the East Java Province APBD, which has decreased by approximately 5% from the initial target. This study uses a quantitative descriptive research method. This research is based on secondary data on the Regional Government Budget Realization Report in the Gerbangkertosusila Region for 2017-2021. This study uses a scale of Regional Financial Dependence Ratio, Degree of Decentralization Ratio, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, and Efficiency Ratio. This study aims to determine the performance of local government budgets in the Gerbangkertosusila region with a financial ratio scale. The results of the average dependency ratio of Gerbangkertosusila before the pandemic for Surabaya City were the lowest at 35% while the highest dependency ratio for Bangkalan Regency was 84%. During the pandemic, the lowest was Surabaya City, 37%, while the highest was Bangkalan Regency, 83%. The results of the average ratio of the degree of decentralization of Gerbangkertosusila before the pandemic were the lowest for Bangkalan Regency, 12%, the highest for Surabaya City, 62%. Meanwhile, during the pandemic, the lowest was Bangkalan Regency, 11%, the highest was Surabaya City, 57%. The results of the average independence ratio of Gerbangkertosusila before the pandemic were the lowest for Bangkalan Regency, 14%, the highest for Surabaya City, 178%. Meanwhile, during the pandemic, the lowest was Lamongan Regency, 28%, the highest was Surabaya City, 157%. The results of the average effectiveness ratio of Gerbangkertosusila before the pandemic were the lowest for Bangkalan Regency, 69%, the highest for Surabaya City, 145%. Meanwhile, during the pandemic, the lowest was Surabaya City, 87%, the highest was Bangkalan Regency, 122%. The results of the average efficiency of Gerbangkertosusila before the pandemic were the lowest for Bangkalan Regency, 25%, and the highest at 86%. Meanwhile, during the pandemic, the lowest was Bangkalan Regency, 27%, the highest was Surabaya City, 85%.

Keywords: Gerbangkertosusila APBD, Dependency Ratio, Degree of Decentralization Ratio, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio

ABSTRAK

Tahun 2020 menjadi sejarah buruk untuk perekonomian Indonesia. Pandemi covid 19 berdampak pada APBD Provinsi Jawa Timur menurun kurang lebih 5% dari target awal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, Penelitian ini dari data sekunder Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah di Wilayah Gerbangkertosusila tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan skala Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja APBD pemerintah daerah di wilayah Gerbangkertosusila dengan skala rasio keuangan. Hasil dari rata-rata rasio ketergantungan Gerbangkertosusila sebelum pandemi Kota Surabaya paling terendah 35% sedangkan ketergantungan paling tinggi Kabupaten Bangkalan 84%. Semasa pandemi paling terendah Kota Surabaya 37%, sedangkan paling tinggi Kabupaten Bangkalan 83%. Hasil dari rata-rata rasio derajat desentralisasi Gerbangkertosusila sebelum pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 12%, paling tinggi Kota Surabaya 62%. Sedangkan semasa pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 11%, paling tinggi Kota Surabaya 57%. Hasil dari rata-rata rasio kemandirian Gerbangkertosusila sebelum pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 14%, paling tinggi Kota Surabaya 178%. Sedangkan semasa pandemi paling rendah kabupaten Lamongan 28%, paling tinggi Kota Surabaya 157%. Hasil dari rata-rata rasio efektivitas

Gerbangkertosusila sebelum pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 69%, paling tinggi Kota Surabaya 145%. Sedangkan semasa pandemi paling rendah Kota Surabaya 87%, paling tinggi Kabupaten Bangkalan 122%. Hasil dari rata-rata efisiensi Gerbangkertosusila sebelum pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 25%, paling tinggi 86%. Sedangkan semasa pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 27%, paling tinggi Kota Surabaya 85%.

Kata Kunci: APBD Gerbangkertosusila, Rasio Ketergantungan, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi

1. Pendahuluan

Tahun 2019 dunia mengalami virus corona jenis baru, yang dinamakan covid 19. Dimana virus ini menjadi sejarah terburuk untuk perekonomian dunia. Corona virus atau covid 19 masuk dan menyebar di Negara Indonesia saat awal tahun 2020, dimana perekonomian Indonesia menurun dengan adanya virus covid 19. Selama pandemi ini, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia memiliki efek yang nyata terhadap perekonomian, baik secara langsung maupun tidak langsung. APBN juga mempengaruhi sektor moneter untuk mencegah inflasi.

Pandemi ini juga berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejak adanya pandemi pada awal tahun, ini sangat berpengaruh terhadap APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2020. Dimana perubahan APBD tahun 2020 Jawa Timur mengalami penurunan kurang lebih hingga 5% dari target awal, dari Rp.35,1 triliun turun menjadi Rp.33,7 triliun. Pemerintah Daerah juga mempunyai kebijakan dalam penggunaan APBD dalam upaya membantu pencegahan penyebaran pandemi dan memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi (Newsroom).

Anggaran yang telah dialokasikan dari pemerintah pusat yang akan digunakan dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan wilayah daerah. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pemerintah daerah diwajibkan dalam mengeksplorasi sumber keuangan dengan baik, terutama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya, melalui PAD, (Rosidin, 2019: 223).

Pandemi Covid-19 menghasilkan dampak terhadap APBD pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kota Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan. Akibat implikasi pandemi Covid-19 ini dapat dilihat dari laporan prestasi anggaran di wilayah Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kota Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Berikut tabel prestasi APBD:

Tabel 1. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan Daerah					
Kab/ kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kab Gresik	2.742.201.536.264	2.876.343.695.519	3.119.200.157.022	2.939.477.566.194	3.133.574.194.041
Kab Bangkalan	2.188.064.292.576	2.034.156.539.451	2.331.628.800.501	2.140.808.956.309	2.275.095.391.762
Kab Mojokerto	2.335.531.986.038	2.434.620.262.423	2.564.369.514.074	2.402.663.250.548	2.606.948.558.432
Kota Surabaya	8.033.573.163.669	8.175.219.120.669	8.765.153.020.782	7.545.416.994.175	8.326.878.076.226
Kab Sidoarjo	4.045.685.362.112	4.332.577.984.768	4.444.626.346.624	4.411.615.214.581	4.669.635.698.473
Kab Lamongan	2.716.042.671.044	2.811.062.543.333	2.864.496.711.416	2.838.272.211.782	2.975.019.936.520
Belanja Daerah					
Kab/ kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kab Gresik	2.116.216.445.466	2.118.545.900.336	2.399.289.318.844	2.485.716.405.438	3.192.751.693.289
Kab Bangkalan	1.625.948.393.637	1.701.951.000.528	1.800.330.739.576	1.679.804.754.219	1.753.785.926.806
Kab Mojokerto	1.907.923.803.679	1.974.978.837.538	2.096.872.534.075	1.950.631.802.941	2.443.306.771.612
Kota Surabaya	7.912.409.152.257	8.176.929.496.298	9.162.655.939.831	8.032.680.988.065	7.819.077.321.545
Kab Sidoarjo	3.171.844.318.891	3.667.417.963.792	3.792.898.814.793	3.844.638.464.890	4.271.217.913.944
Kab Lamongan	2.727.998.787.835	2.812.188.903.958	2.302.768.392.919	2.217.800.561.599	2.258.116.423.634

Pembiayaan Daerah					
Kab/ kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kab Gresik	67.933.432.725	165.519.546.723	323.517.763.365	462.004.151.544	305.955.960.203
Kab Bangkalan	41.392.653.799	189.600.320.290	113.904.656.341	104.587.170.829	129.171.943.620
Kab Mojokerto	290.474.586.996	279.653.151.607	153.761.967.864	348.529.673.129	346.224.427.240
Kota Surabaya	1.068.144.127.992	1.201.995.194.680	1.200.317.972.688	803.876.572.132	316.623.750.966
Kab Sidoarjo	585.678.501.522	884.177.835.763	1.028.571.419.105	1.125.131.644.892	1.107.460.717.093
Kab Lamongan	63.842.975.480	46.144.463.889	41.187.753.267	36.290.160.938	51.075.446.606

Sumber: BPK Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2021 (Data Diolah).

Pengelolaan mutu anggaran daerah yang bagus dapat dilihat dari kinerja anggarannya, instrumen yang bisa digunakan dalam mengukur dan menganalisis prestasi dari pemerintah daerah dalam mengelola anggarannya adalah dengan menggunakan analisis perbandingan keuangan terhadap APBD yang sudah ditetapkan. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio tingkat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

2. Tinjauan Pustaka

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik berkaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada ranah publik. Ranah publik memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Sektor publik dipengaruhi banyak faktor tidak cuman faktor ekonomi semata, namun faktor politik, sosial, budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan, (Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 2018)

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio Kinerja Keuangan

Rasio keuangan adalah kegiatan menganalisis laporan keuangan dengan cara membandingkan satu akun dalam laporan keuangan, perbandingannya bisa antara neraca dan akun laba rugi. (Sujawerni, 2020).

1. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima pendapatan daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi, (Mahmudi, 2019).

2. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, (Mahmudi, 2019).

3. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan total pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi pula kemandirian keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2019)

4. Rasio Efektivitas

Rasio ini dihitung dengan membandingkan penerimaan PAD aktual dengan penerimaan PAD target (dianggarkan). Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai target (Mahmudi, 2019)

5. Rasio Efisiensi

Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Untuk menghitung rasio efisiensi, diperlukan data tambahan yang tidak tersedia dalam laporan realisasi anggaran, yaitu data biaya pengumpulan pendapatan asli daerah (Mahmudi, 2019)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Sesuai dengan undang-undang tentang keuangan negara, APBD berfungsi sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Selain itu, APBD dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakatnya mengenai prioritas alokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Daerah

Menurut (Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru, 2018), penerimaan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

Belanja Daerah

Menurut Halim (2018), yang dimaksud belanja menurut basis kas adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan belanja berbasis akrual, belanja merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih.

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Netto selisih pendapatan daerah setelah dikurangi belanja daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang dari penerimaan pembiayaan setelah dikurangi beban pembiayaan pada periode laporan dicatat dalam pos pembiayaan bersih, (Halim, 2018).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gersik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan selama lima tahun anggaran periode 2017-2021 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Teknik uji dalam penelitian ini menggunakan uji skala rasio keuangan, rasio ketergantungan, rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

1. Rasio Ketergantungan

Mengukur rasio ketergantungan

Tabel 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	=	$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
--------------------------------------	---	--

Sumber: Mahmudi: 2019

Tabel 3. Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan

No	Presentase	Kategori
1	0.00%	Tidak Bergantung
2	10.01% - 20%	Rendah Sekali
3	20.01% - 30%	Rendah
4	30.01% - 40%	Sedang
5	40.01% - 50%	Tinggi
6	> 50.00%	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, 1991 (dalam 2015)

2. Rasio Derajat Desentralisasi

Mengukur rasio derajat desentralisasi

Tabel 4 Rasio Desentralisasi

Derajat Desentralisasi =	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan daerah}}$	X 100%
--------------------------	--	--------

Sumber: Mahmudi: 2019

Tabel 5. Kriteria Penilaian Rasio Derajat Desentralisasi

No	Presentase	Kategori
1	0.00%	Sangat Kurang
2	10.01% - 20%	Kurang
3	20.01% - 30%	Cukup
4	30.01% - 40%	Sedang
5	40.01% - 50%	Baik
6	> 50.00%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, 1991 (dalam 2015)

3. Rasio Kemandirian

Mengukur rasio kemandirian

Tabel 6. Rasio kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Daerah =	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}}$	X100%
----------------------------	---	-------

Sumber: Mahmudi: 2019

Tabel 7. Karakteristik Rasio Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Kemandirian %	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipasif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Abdul Halim 2017

4. Rasio Efektivitas

Mengukur rasio efektivitas

Tabel 8. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD =	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$	X 100%
-------------------------	--	--------

Sumber: Mahmudi (2019).

Tabel 9 Kriteria Rasio Efektivitas

Sangat Efektif	: > 100%
Efektif	: 100%
Cukup Efektif	: 90% - 99%
Kurang Efektif	: 75% - 89%
Tidak Efektif	: < 75

Sumber: Mahmudi 2019

5. Rasio Efisiensi

Mengukur rasio efisiensi

Tabel 10. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2019)

Tabel 11. Kriteria Rasio Efisiensi

Sangat Efisien	: < 10%
Efisien	: 10% - 20%
Cukup Efisien	: 21% - 30%
Kurang Efisien	: 31% - 40%
Tidak Efisien	: > 40%

Sumber: Mahmudi 2019

4. Hasil Dan Pembahasan**Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Gerbangkertosusila****Tabel 12. Hasil Rasio Ketergantungan**

Hasil Rasio Ketergantungan						
Tahun	Kab Gresik	Kab Bangkalan	Kab Mojokerto	Kota Surabaya	Kab Sidoarjo	Kab Lamongan
2017	67.53%	83.82%	65.27%	35.12%	58.30%	64.77%
2018	66.66%	84.58%	66.13%	36.35%	57.39%	66.25%
2019	66.18%	84.05%	66.03%	34.38%	58.26%	64.92%
Rata-rata sebelum pandemi	67%	84%	66%	35%	58%	65%
2020	65.15%	84.04%	64.26%	36.12%	55.23%	59.96%
2021	63.67%	81.74%	72.58%	38.65%	54.87%	75.61%
Rata-rata semasa pandemi	64%	83%	68%	37%	55%	68%

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan dari tabel 12 diatas dapat dilihat bahwa hasil dari Laporan Realisasi Gerbangkertosusila tahun anggaran 2017-2021 sebelum dan semasa pandemi adalah dari rata-rata rasio ketergantungan Gerbangkertosusila sebelum pandemi Kota Surabaya paling terendah 35% sedangkan ketergantungan paling tinggi Kabupaten Bangkalan 84%. Semasa pandemi paing terendah Kota Surabaya 37%, sedangkan paling tinggi Kabupaten Bangkalan 83%.

Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Gerbangkertosusila

Tabel 13. Hasil Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi						
Tahun	Kab Gresik	Kab Bangkalan	Kab Mojokerto	Kota Surabaya	Kab Sidoarjo	Kab Lamongan
2017	31.78%	14.87%	21.43%	64.25%	41.32%	19.72%
2018	33.28%	9.79%	22.43%	60.83%	38.90%	15.53%
2019	31.44%	11.24%	21.64%	61.40%	38.02%	16.47%
Rata-rata sebelum pandemi	32%	12%	22%	62%	39%	17%
2020	31.45%	10.89%	22.36%	56.85%	40.56%	16.97%
2021	32.91%	11.94%	23.99%	56.77%	41.14%	29.32%
Rata-rata semasa pandemi	32%	11%	23%	57%	41%	23%

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan dari tabel 13 diatas dapat dilihat bahwa hasil dari Laporan Realisasi Gerbangkertosusila tahun anggaran 2017-2021 sebelum dan semasa pandemi adalah dari rata-rata rasio derajat desentralisasi Gerbangkertosusila sebelum pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 12%, paling tinggi Kota Surabaya 62%. Sedangkan semasa pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 11%, paling tinggi Kota Surabaya 57%.

Analisis Rasio Kemandirian Gerbangkertosusila

Tabel 14. Hasil Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian						
Tahun	Kab Gresik	Kab Bangkalan	Kab Mojokerto	Kota Surabaya	Kab Sidoarjo	Kab Lamongan
2017	47.06%	17.74%	32.82%	182.93%	70.86%	24.39%
2018	47.30%	11.58%	33.92%	178.12%	67.78%	23.44%
2019	12.09%	13.38%	28.41%	173.36%	65.32%	25.37%
Rata-rata sebelum pandemi	35%	14%	32%	178%	68%	24%
2020	41.98%	53.42%	34.77%	167.38%	73.80%	28.30%
2021	56.71%	14.60%	33.05%	146.85%	112.05%	26.87%
Rata-rata semasa pandemi	49%	34%	34%	157%	93%	28%

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan dari tabel 14 diatas dapat dilihat bahwa hasil dari Laporan Realisasi Gerbangkertosusila tahun anggaran 2017-2021 sebelum dan semasa pandemi adalah dari rata-rata rasio kemandirian Gerbangkertosusila sebelum pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 14%, paling tinggi Kota Surabaya 178%. Sedangkan semasa pandemi paling rendah kabupaten Lamongan 28%, paing tinggi Kota Surabaya 157%.

Analisis Rasio Efektivitas Gerbangkertosusila

Tabel 15. Hasil Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas						
Tahun	Kab Gresik	Kab Bangkalan	Kab Mojokerto	Kota Surabaya	Kab Sidoarjo	Kab Lamongan
2017	95.71%	10.83%	112.02%	109.60%	107.32%	98.32%
2018	103.83%	88.46%	113.09%	113.11%	112.84%	88.04%
2019	107.40%	107.40%	92.17%	212.33%	98.92%	91.26%
Rata-rata sebelum pandemi	102%	69%	106%	145%	106%	93%
2020	113.28%	110.37%	112.58%	85.20%	117.44%	99.62%
2021	89.40%	133.95%	115.79%	88.81%	112.05%	126.48%
Rata-rata semasa pandemi	101%	122%	114%	87%	115%	113%

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan dari tabel 15 diatas dapat dilihat bahwa hasil dari Laporan Realisasi Gerbangkertosusila tahun anggaran 2017-2021 sebelum dan semasa pandemi adalah dari rata-rata rasio efektivitas Gerbangkertosusila sebelum pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 69%, paling tinggi Kota Surabaya 145%. Sedangkan semasa pandemi paling rendah Kota Surabaya 87%, paling tinggi Kabupaten Bangkalan 122%.

Analisis Rasio Efisiensi Gerbangkertosusila**Tabel 17. Hasil Rasio Efisiensi**

Rasio Efisiensi						
Tahun	Kab Gresik	Kab Bangkalan	Kab Mojokerto	Kota Surabaya	Kab Sidoarjo	Kab Lamongan
2017	70.77%	17.93%	71.54%	83.07%	61.90%	66.90%
2018	63.22%	32.19%	70.21%	86.55%	64.64%	38.76%
2019	24.30%	25.72%	34.33%	87.02%	67.57%	39.64%
Rata-rata sebelum Pandemi	53%	25%	59%	86%	65%	48%
2020	66.86%	30.22%	65.64%	84.54%	57.03%	33.46%
2021	90.27%	23.74%	61.60%	85.59%	58.51%	27.76%
Rata-rata semasa pandemi	79%	27%	64%	85%	58%	31%

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan dari tabel 16 diatas dapat dilihat bahwa hasil dari Laporan Realisasi Gerbangkertosusila tahun anggaran 2017-2021 sebelum dan semasa pandemi adalah dari rata-rata efisiensi Gerbangkertosusila sebelum pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 25%, paling tinggi 86%. Sedangkan semasa pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 27%, paling tinggi Kota Surabaya 85%.

5. Penutup

Hasil penelitian analisis kinerja APBD Gerbangkertosusila menghasilkan beberapa kesimpulan Skala rasio ketergantungan, rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 dapat disimpulkan:

1. Hasil dari rata-rata rasio ketergantungan Gerbangkertosusila sebelum pandemi Kota Surabaya paling terendah 35% sedangkan ketergantungan paling tinggi Kabupaten Bangkalan 84%. Semasa pandemi paing terendah Kota Surabaya 37%, sedangkan paling tinggi Kabupaten Bangkalan 83%.
2. Hasil dari rata-rata rasio derajat desentralisasi Gerbangkertosusilla sebelum pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 12%, paling tinggi Kota Surabaya 62%. Sedangkan semasa pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 11%, paling tinggi Kota Surabaya 57%.
3. Hasil dari rata-rata rasio kemandirian Gerbangkertosusila sebelum pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 14%, paling tinggi Kota Surabaya 178%. Sedangkan semasa pandemi paling rendah kabupaten Lamongan 28%, paing tinggi Kota Surabaya 157%.
4. Hasil dari rata-rata rasio efektivitas Gerbangkertosusila sebelum pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 69%, paling tinggi Kota Surabaya 145%. Sedangkan semasa pandemi paling rendah Kota Surabaya 87%, paling tinggi Kabupaten Bangkalan 122%.
5. Hasil dari rata-rata efisiensi Gerbangkertosusila sebelum pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 25%, paling tinggi 86%. Sedangkan semasa pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 27%, paling tinggi Kota Surabaya 85%.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, berikut saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya:

1. Bagi peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel seperti akuntabilitas terhadap Pemerintah Daerah di wilayah Gerbangkertosusila maupun di Provinsi Jawa Timur.
2. Penelitian tersebut hanya menggunakan beberapa sampel di Pemerintah Daerah Gerbangkertosusila, sehingga peneliti selanjutnya bisa memperluas sampel penelitian di Provinsi Jawa Timur.

Daftar Pustaka

- Halim, Abdul, (2017), *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, Muhammad Syam Kusufi. (2018). *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi, (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andy Yogyakarta.
- Rosidin. (2019). *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Kabupaten*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sujarweni, V Wiratna. (2017). *Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi, & Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Aginka, Mutia, Sugih Sutrisno Putra, Sudrajat. (2021). *Analisis Kinerja Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19*. Politeknik Negeri Bandung.
- Aryani, Habsyah Fitri. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19*. Nahdlatul Ulama Indonesia.
- Fadhila, Astri, Ria Haryatiningsy. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Pada Masa Sebelum Dan Pasca Pandemi Covid-19*. Universitas Islam Bandung.
- Karina, Nisfi Nofa, Puji Wibowo. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Palupi, Dyah, Dassad, Riyanti, Budi Wahyudi. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Sebelum Pandemi Dan Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2019- 2021*. Universitas Gunadarma.
- Puspita, Wulan Dri, Dyah Ani Pangastuti. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Pemkot Batu Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19*. Universitas Merdeka Malang.
- Raisa, Nadila Amanda, Ari Nuru Fatimah. (2022). *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid 19 Di Pemerintah Kabupaten Dan Kota Magelang Untuk Periode 2019 – 2020*. Universitas Tidar Magelang.
- Vebiani, Demvi, Nugraha, Rd Dian Hardiana. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat)*. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.
- Bangkalan, P. K. (2019). *Pemerintah Kabupaten Bangkalan*. <https://www.bangkalankab.go.id/site/visimisi>.
- BPK, S. W. (2020). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137323/uu-no-2-tahun-2020>.
- BPK, S. W. (n.d.). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>.
- Diskominfo. (2022). *Transparansi Pengelolaan Anggaran*. <https://surabaya.go.id/id/berita/60032/transparansi-pengelolaan-anggar>.
- Informatika, D. K. (2023). *Pemerintah Kabupaten Gresik*. Retrieved from <https://www.gresikkab.go.id/info/visi-misi>.
- Lamongan, K. (2022). *Kabupaten Lamongan*. <https://lamongankab.go.id/beranda/portal/visi&misi>.
- Mojokerto, D. K. (2023). *Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto*. <https://mojokertokab.go.id/visi-dan-misi>.
- Newsroom, J. (n.d.). *Dampak Pandemi, Pendapatan Daerah P &€“ APBD Jatim Tahun 2020 Mengalami Penurunan*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/dampak-pandemi-pendapatan-daerah-p-apbd-jatim-tahun-2020-mengalami-penurunan>
- Sidoarjo, K. (2018). *Kabupaten Sidoarjo*. <https://kota.sidoarjokab.go.id/?page=visi-misi>.
- Surabaya, B. I. (2021). *Pemerintah Kota Surabaya*. <https://surabaya.go.id/id/berita/60539/visi-misi-kota-surabaya>.